

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **V.1 Simpulan**

Penelitian bertujuan untuk menguji mengenai pengaruh antara pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah, tingkat ketergantungan daerah, dan opini audit terhadap tingkat pengungkapan LKPD dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi. Berdasarkan hasil yang didapatkan dan telah dijelaskan pada bab IV sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat dibuat sebagai berikut:

- a. Pendapatan asli daerah selaku variabel independen berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Besarnya pendapatan asli daerah membuat pemerintah daerah terdorong untuk mengungkapkannya dalam LKPD sebagai tanda bahwa pemerintah telah mengelola potensi daerah dan pengelolaannya dengan baik.
- b. Ukuran pemerintah daerah selaku variabel independen juga berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hal tersebut menunjukkan ukuran pemerintah daerah memberikan tekanan untuk mengungkapkan LKPD sebagai bentuk tanggungjawab karena pengelolaannya yang kompleks.
- c. Tingkat ketergantungan daerah selaku variabel independen tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hal tersebut dikarenakan pemerintah pusat memberikan dana nya kepada pemerintah daerah hanya sebagai kegiatan rutin, sehingga kurangnya pengawasan dan tidak memberikan tekanan yang cukup untuk pemerintah daerah mengungkapkan LKPD.
- d. Opini audit selaku variabel independen tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Opini audit yang diberikan BPK pada LKPD tidak serta merta mendorong pemerintah daerah untuk mengungkapkannya karena kinerja pemerintah tidak hanya diukur dari hasil dan opini audit pada laporan keuangan.
- e. Sistem pengendalian internal selaku variabel moderasi dapat memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hal ini menunjukkan pemerintah daerah yang memiliki pendapatan asli daerah

yang besar dan SPI yang memadai membuat pemerintah daerah semakin terdorong untuk mengungkapkannya dalam LKPD.

- f. Sistem pengendalian internal selaku variabel moderasi tidak memoderasi pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hal ini menunjukkan total aset pemerintah daerah yang besar memerlukan kemampuan yang memadai dalam pencatatannya, sehingga menjadi kendala untuk mengungkapkannya dalam LKPD walaupun SPI telah efektif.
- g. Sistem pengendalian internal selaku variabel moderasi tidak memoderasi pengaruh tingkat ketergantungan daerah terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hal ini menunjukkan bahwa SPI yang efektif tidak mendorong pemerintah daerah melakukan pengungkapan LKPD karena adanya pemberian dana dari pemerintah pusat.
- h. Sistem pengendalian internal selaku variabel moderasi tidak memoderasi pengaruh opini audit terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hal ini menunjukkan SPI yang dimiliki tidak mendorong opini audit yang akan didapatkan baik yang dapat membuat pemerintah daerah melakukan pengungkapan LKPD.

## V.2 Saran

Berdasarkan pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dalam penelitian ini terdapat saran agar manfaat dapat diberikan. Saran yang dapat diberikan sebagai berikut.

### a. Saran Teoritis

Saran yang dapat diberikan kepada penelitian berikutnya yaitu menggunakan lebih banyak sampel pemerintah daerah atau tidak hanya menggunakan satu pulau, seperti menggunakan LKPD yang ada di seluruh kabupaten/kota di Indonesia maupun menambah tahun penelitian agar lebih jelas dan mendalam serta dapat mengurangi permasalahan yang mungkin terjadi dalam pengolahan data. Selain itu, pada penelitian ini tingkat ketergantungan daerah dan opini tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD serta sistem pengendalian internal hanya dapat memoderasi pengaruh pendapatan asli

daerah terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Disarankan untuk penelitian selanjutnya menggunakan variabel lain seperti yang digunakan oleh penelitian Rahim et al. (2020) yaitu *the number of residents, the number of SKPD, dan the number of audit findings*.

b. Saran Praktis

1) Bagi pemerintah daerah

Bagi pemerintah daerah yang berada di pulau Sulawesi diharapkan dapat mengungkapkan LKPD secara lebih optimal sesuai SAP dengan memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini untuk memudahkan pemerintah daerah melakukan hal tersebut dan melakukan transparansi kepada masyarakat dengan akses informasi yang mudah. Selain itu, pemerintah daerah agar lebih meningkatkan komitmen yang dimiliki dalam hal pengungkapan sebagai bentuk pertanggungjawaban, meningkatkan proses pencatatan dan pembuatan kebijakan-kebijakan yang dapat memberikan tekanan bagi penyusun laporan keuangan sehingga melakukan pengungkapan secara penuh.

2) Bagi pemerintah pusat

Dalam hubungan dengan pemerintah daerah selaku prinsipal diharapkan dapat melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin kepada pemerintah daerah terkait dana yang diberikan, sehingga pemerintah daerah memiliki tekanan untuk mengungkapkan LKPD.